

**UPAYA INDONESIA
UNTUK MEMBANGKITKAN SOLIDARITAS ASIA AFRIKA
MELALUI NAASP**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Magister Ilmu Sosial dalam bidang ilmu Hubungan Internasional



Oleh :

Desmond Satria Andrian

2014851003

Pembimbing:

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA INDONESIA
UNTUK MEMBANGKITKAN SOLIDARITAS ASIA AFRIKA
MELALUI NAASP**



Oleh :

Desmond Satria Andrian

2014851003

**Disetujui untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Rabu, 11 Januari 2017**

Pembimbing:

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**



Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Desmond Satria Andrian
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014851003
Program Studi : Magister Ilmu Sosial
Konsentrasi Hubungan Internasional
Program Pascasarjana
Universitas Katholik Parahyangan

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

UPAYA INDONESIA UNTUK MEMBANGKITKAN SOLIDARITAS ASIA AFRIKA MELALUI NAASP

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katholik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 11 Januari 2017




Desmond Satria Andrian

UPAYA INDONESIA UNTUK MEMBANGKITKAN SOLIDARITAS ASIA AFRIKA MELALUI NAASP

Desmond Satria Andrian (NPM: 2014851003)
Pembimbing: Drs. Yulius Purwadi Hermawan, M.A., Ph.D
Magister Ilmu Sosial
Bandung
Januari 2017

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui bahwa untuk pertama kalinya pasca KAA 1955 negara-negara di Asia dan Afrika memiliki mekanisme kerjasama multilateral, yaitu NAASP. Sejak digulirkan pertama kali pada KTT AA 2005 di Jakarta Indonesia, NAASP telah memasuki dasawarsa pertama. Meski terus berproses, keberhasilan NAASP dirasa masih kurang di mana belum ditemukan bukti otentik yang memperlihatkan antusiasme negara-negara anggotanya terhadap NAASP.

Permasalahan-permasalahan di atas memunculkan pertanyaan menarik untuk diteliti yaitu, *Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam membangkitkan Solidaritas Asia Afrika melalui NAASP?* dan *Apa yang menyebabkan NAASP tidak berjalan seperti yang diharapkan?* Untuk menjawab pertanyaan penelitian itu Penulis menggunakan konsep Multilateralisme sebagai kerangka pemikiran utama untuk keperluan analisa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah paradigma Tradisional.

Dalam penelitian ini Penulis menemukan adanya ketidaksinkronan antara kepentingan *intangible needs* Indonesia dan kepentingan *tangible needs* kawasan Afrika melalui NAASP. Sejak Fase Pembukaan NAASP, kelahiran NAASP datang dari idealisme, bukan materialisme. Dalam Fase Perumusan hal-hal utama terkait tanggung jawab substansi dan finansial NAASP menjadi isu krusial. Dua hal itu diemban oleh pemerintah Indonesia. Lalu, dalam Fase Implementasi isu Palestina lebih banyak mendominasi tinimbang isu investasi dan perdagangan seperti yang dicita-citakan Afrika Selatan di awal gagasan. Akhirnya, dalam masalah institusionalisasi, NAASP pun tak luput dari permasalahan. Sebab, pasca periode Pertama Keketuaan Bersama NAASP Indonesia - Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 2011 lalu NAASP tidak mendapatkan kandidat suksesi dari negara-negara anggotanya.

Setelah melakukan studi dokumen dan wawancara, Penulis menyimpulkan bahwa NAASP kurang berhasil akibat masalah koordinasi dan kolaborasi NAASP. Hal itu dipicu oleh dua faktor, yaitu (1) adanya dilema kepentingan antara Indonesia dan Afrika Selatan selaku Ketua Bersama NAASP sehingga program-program implementasi NAASP yang diinisiasi tidak sejalan dengan kebutuhan NEPAD Afrika, dan (2) adanya aliansi asimetri dalam NAASP sebagai konsekuensi dari kemunculan proliferasi antar kemitraan strategis di luar mekanisme NAASP di kawasan Asia dan Afrika.

Kata Kunci: KAA, Multilateralisme, Dilema Kepentingan, Proliferasi Kemitraan Strategis

INDONESIA'S EFFORT TO RAISE THE ASIAN-AFRICAN SOLIDARITY THROUGH NAASP

Desmond Satria Andrian (NPM: 2014851003)
Supervisor: Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D
Master of Social Science
Bandung
January 2017

ABSTRACT

NAASP is the first multilateral mechanism framework of the Asian-African countries post-the 1955 Bandung Conference. Since that it was declared in the 2005 Asian-African Summit, NAASP now has been over one decade. Despite of its process, NAASP runs less success for the reason that there have been yet a fact in which its countries members demonstrate their enthusiasms towards NAASP.

Those arise the questions for a research, namely How do the Indonesian government arise the Asian-African Solidarity through NAASP? and, therefore, What factors do cause the NAASP run less success?. To answer those two research questions, the multilateralism concept is applied as the analytic tool. Therefore, the Traditionalist paradigm accompanies it as its research methode.

From the research it is found that there is a paradox of interest between the intangible needs of Indonesia and the tangible needs of African region through NAASP. Since the conception phase of NAASP, it was established by the idealism, not the materialism. Then, in the formulation phase of NAASP, the responsibility of finance and substance appeared as the crucial issues. Those two are finally the responsible of Indonesia. During the implementation phase of NAASP, the Palestine issue is more dominant than the trade and investment issues as those were wished by South Africa at the conception phase. Last but not least, the institutionalization of NAASP matters. The first period of NAASP Co-Chairs of Indonesia and South Africa concluded in 2011 but, unfortunately, NAASP is succeded by no countries members.

After studying documents and doing some interviews, it is deduced that NAASP run less success resulting from the issue of coordination and collaboration. It owes to two factors, namely 1) interest dilemma of Indonesia and South Africa so that the implemented programs of NAASP missed the tangible needs of African NEPAD, and 2) asymmetric alliance of NAASP as the consequence of proliferation of strategic partnerships - beyond NAASP - in Asia and Africa.

Keywords: *Bandung Conference, Multilateralism, Interest Dilemma, Proliferation of Strategic Partnerships.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, tesis dengan judul *Upaya Pemerintah Indonesia untuk Membangkitkan Solidaritas Asia Afrika melalui NAASP* ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Studi Magister Ilmu Sosial, Sekolah Pascasarjana Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, Penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Maka itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., PhD. serta Bapak I Nyoman Sudira, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Penguji.

Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial, Bapak Gandhi Pawitan, Ph.D.
2. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Sosial, Sekolah Pascasarjana Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
3. Kepala Museum KAA (2008 - 2012), Drs. Isman Pasha, M.H., dan Kepala Museum KAA (2012 - 2015) Thomas Ardian Siregar, S.IP, M.A.

4. Istri saya Cicilia Juliana atas segala motivasi, perhatian, dukungan, dan doanya.
5. Wim Tohari Daniealdi dan Jefri Raditiyo, rekan dalam perjuangan pergerakan kerakyatan untuk cita-cita sosialisme Indonesia.
6. Kaum proletar, marhaen, dan murba di Indonesia. *Sekali Kiri Setelah Itu Mati!*

Akhirnya, Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini. Semua kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan tesis ini sangat dinantikan.

Bandung, 11 Januari 2017

Penulis

Desmond Satria Andrian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR SINGKATAN..... viii

DAFTAR GAMBAR DAN TABELx

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.2.1 Pembatasan Masalah 15

1.2.2 Perumusan Masalah 15

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian 15

1.3.2 Kegunaan Penelitian 16

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Politik Luar Negeri Indonesia 17

1.4.2 NAASP..... 20

1.4.3 Kemitraan Strategis..... 27

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Multilateralisme 29

1.5.2 *Strategic Partnership* 32

1.6 Argumen Pokok.....	36
1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
1.7.1 Metode Penelitian	37
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	41
1.8 Sistematika Pembahasan.....	42

BAB II DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA–AFRIKA

2.1 Irian Barat dan PLN Indonesia di Afrika.....	48
2.2 Desukarnoisasi dan PLN Indonesia di Afrika.....	53
2.3 PLN Indonesia di Afrika Pasca Desukarnoisasi.....	58
2.3.1 Pembekuan Hubungan Diplomatik Indonesia di Afrika.....	59
2.3.2 Suara Afrika dalam Persoalan Irian Barat.....	63
2.3.3 Ambiguitas Indonesia di GNB	66
2.3.4 Indonesia (bukan) Pendiri GNB	70
2.3.5 Indonesia Pelopor Kolonialisme Dunia Ketiga	72
2.3.6 Suara Afrika dan Kegagalan Indonesia di IPU.....	75
2.3.7 Suara Afrika dan Kegagalan Indonesia di WTO	76
2.4 PLN Indonesia di Afrika Pasca Perang Dingin.....	78

BAB III NAASP SEBAGAI FORUM KERJA SAMA

3.1 NAASP: Forum Kerja Sama Multilateral Asia Afrika	86
3.2 NAASP dan Peran Indonesia.....	97
3.3 Kajian NAASP	
3.3.1 Fase Pembunuhan NAASP	

3.3.1.1 Latar Belakang	
3.3.1.1.1 Unilateralisme	102
3.3.1.1.2 Globalisasi.....	103
3.3.1.1.3 Arena Multifora.....	105
3.3.1.1.4 Kepentingan Nasional Indonesia.....	106
3.3.1.2 <i>Phnom Penh Initiative</i>	107
3.3.2 Fase Perumusan NAASP	
3.3.2.1 Pertemuan Pertama AASROC	113
3.3.2.2 Kelompok Kerja AASROC	116
3.3.2.3 Pertemuan Kedua AASROC	118
3.3.2.4 Pertemuan Pejabat Senior Asia Afrika	121
3.3.3 Fase Pengesahan NAASP	
3.3.3.1 KTM Asia Afrika 2005.....	128
3.3.3.2 KTT Asia Afrika 2005.....	129
3.3.4 Fase Implementasi NAASP	
3.3.4.1 Implementasi NAASP Tahun 2006	137
3.3.4.2 Implementasi NAASP Tahun 2007	141
3.3.4.3 Implementasi NAASP Tahun 2008	143
3.3.4.4 Implementasi NAASP Tahun 2009	143
3.3.4.5 Implementasi NAASP Tahun 2010	146
3.3.4.6 Implementasi NAASP Tahun 2012-2014	147
3.3.5 Fase Revitalisasi NAASP 2015	149
3.3.6 Analisa Capaian NAASP	
3.3.6.1 NEPAD dan Isu Palestina	151

3.3.6.2 NAASP sebagai Mekanisme Multilateral	154
3.3.6.3 Mekanisme Institusional NAASP.....	155

BAB 4 NAASP: PROLIFERASI KEPENTINGAN

4.1 Faktor Internal: Dilema Kepentingan	
4.1.1 Peta Debat Epistemologis Faktor Internal.....	159
4.1.2 Kepentingan Indonesia	
4.1.2.1 <i>Missing Link</i> Indonesia-Afrika.....	161
4.1.2.2 Kepentingan Rezim Indonesia	165
4.1.2.3 Volume Perdagangan Indonesia-Afrika.....	178
4.1.2.4 Geopolitik PLN Indonesia	182
4.1.3 Kepentingan Afrika	
4.1.3.1 Afrika Bangkit.....	185
4.1.3.2 NEPAD: Mekanisme Kemitraan Strategis Afrika....	189
4.2 Faktor Eksternal: Aliansi Asimetri	
4.2.1 Aliansi Asimetri dalam Solidaritas Asia Afrika.....	192
4.2.2 Kepentingan Ekonomi Politik Asia di Afrika	201
4.2.3 Tren Perdagangan dan Investasi di Afrika	211
4.2.4 Kemitraan Strategis di Afrika.....	217
4.2.5 NAASP: Bilateral versus Multilateral	220
4.3 Analisa Faktor Internal dan Faktor Eksternal	
4.3.1 Institusionalisasi Rezim	225
4.3.2 Modalitas Multilateralisme	226
4.3.3 Bilayer Rezim Internasional.....	227

BAB 5 KESIMPULAN231

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

AASROC	: <i>Asian-African Sub-Regional Organization Conference</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	: <i>Association of South-East Asian Nations</i>
AU	: <i>African Union</i>
BPPK	: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
COSATU	: <i>Congress of South African Trade Unions</i>
CSSR	: <i>Collapse Structure Search and Rescue</i>
FEALAC	: <i>Forum for East Asia-Latin America Cooperation</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FOCAC	: <i>Forum on China-Africa Cooperation</i>
GAA	: <i>Group of Asia and Africa</i>
GNB	: Gerakan Nonblok
IAF	: <i>India-Africa Forum</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IPU	: <i>International Parliamentary Union</i>
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KAF	: <i>Korea-Africa Forum</i>
KIK	: Kerjasama Intra Kawasan
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KTM	: Konferensi Tingkat Menteri
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KTT AA	: Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika

Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
NAASP	: <i>New Asian-African Strategic Partnership</i>
NEPAD	: <i>New Economic Partnership for African Development</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
P4	: Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pepera	: Pemungutan Pendapat Rakyat
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PLN	: Politik Luar Negeri
PM	: Perdana Menteri
PMA	: Penanam Modal Asing
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
SECEM	: <i>School of Environmental Conservation & Ecotourism and Management</i>
SME	: <i>Small and Medium Enterprise</i>
SOM	: <i>Senior Official Ministers</i>
TAC	: <i>Turkey-Africa Cooperation</i>
TICAD	: <i>Tokyo International Conference on African Development</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UNEP	: <i>United Nation Environment Program</i>
UNGA	: <i>United Nation General Assembly</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

Gambar 1: Tahap NAASP 2002-2015	101
---------------------------------------	-----

TABEL

Tabel Perdebatan Tradisionalis versus Behavioralis	40
Tabel Afrika Secara Politis di Mata Indonesia.....	80
Tabel Debat Reflektifisme versus Rasionalisme NAASP	160
Tabel Tujuan Ekspor Afrika (2001 - 2003).....	212
Tabel Pertumbuhan Rata-rata Ekspor Afrika Kategori Tujuan.....	213
Tabel Pertumbuhan Rata-rata Impor Asia Kategori Asal	214
Tabel Tren Ekspor Afrika ke Asia.....	214
Tabel Total Perdagangan Afrika (2000-2014)	215
Tabel Kemitraan Strategis di Afrika (2004 -2008).....	218
Tabel Bilateral versus Multilateral NAASP	222

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa KAA 61 tahun lalu di Kota Bandung telah melahirkan sebuah *common ground* bagi peluang kemunculan kerja sama negara-negara di Asia dan Afrika. Dokumen yang mendeklarasikan *common ground* itu adalah sebuah komunike akhir produk KAA 1955, yaitu Komunike Akhir KAA. Di dalamnya tercantum enam hal utama, yakni (1) kerjasama kebudayaan, (2) kerjasama ekonomi, (3) *self-determination*, (4) masalah rakyat jajahan, (5) masalah-masalah lain, dan (6) memajukan kerja sama dan perdamaian dunia yang terformulasi dalam Sepuluh Prinsip Bandung atau populer dengan nama Dasasila Bandung.¹

Proposisi *common ground* itu telah diajukan Indonesia jauh sejak masa perumusan gagasan KAA pada Konferensi Kolombo pada tahun 1954 di Kota Kolombo, Sri Lanka kepada para empat perdana menteri sponsor KAA, yakni Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Jawaharlal Nehru (India), Mohammed Ali Boghra (Pakistan), dan U Nu (Burma). Proposisi itu sebelumnya dirumuskan dalam Pertemuan Tugu di Wisma Tugu, Puncak, Bogor, Jawa Barat pada bulan Januari 1954 oleh para Kepala Perwakilan Indonesia di kawasan Asia, Pasifik, dan Arab (Afrika).

Pertemuan yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mr. Soenaryo kala itu merumuskan sebuah proposisi yang berbunyi:

¹ Roeslan Abdulgani. *The Bandung Connection*. (Jakarta: Gunung Agung, Maret 1980). Hal 34.

...mengusulkan pertemuan sejenis Konferensi Kolombo namun dengan cakupan yang lebih luas untuk memajukan kerjasama di antara bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika.²

Proposisi itu menjadi instrumentasi Indonesia dalam mencapai *Hard-Interest* di bidang kedaulatan. Pasalnya, akibat perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949 di Kota The Hague, Belanda, Indonesia terus berupaya menempuh berbagai cara untuk mengembalikan Irian Barat demi keutuhan NKRI. Kehadiran Belanda di Irian Barat pasca tercapainya perundingan KMB dianggap mencederai kedaulatan wilayah Indonesia. Instrumentasi itu dijalankan melalui arena multilateralisme. Pemilihan arena multilateralisme itu didasari atas pertimbangan bahwa (1) sistem internasional yang berlaku kala itu adalah bipolarisme, dan (1) kenyataan masih banyaknya wilayah di kawasan Asia dan Afrika yang masih bergulat dengan kolonialisme, terutama di belahan benua Afrika.

Di sisi lain, para negara Asia dan Afrika memanfaatkan KAA sebagai instrumen untuk menuju keanggotaan PBB. Pasalnya, lebih dari separuh negara peserta KAA 1955 terhambat oleh konstelasi Blok Barat dan Blok Timur di PBB. Hal-hal itu yang kemudian mendorong kemunculan sebuah *common interest* dalam bentuk *balancing without alliances* di antara negara-negara Asia dan Afrika. *Balancing without alliances* pertama tercapai saat 25 negara di Asia dan Afrika berhasil diterima sebagai anggota baru PBB pasca KAA. Kehadiran mereka di PBB menandai era baru peran Dunia Ketiga dalam multilateralisme

² Ali Sastroamidjojo. *Tonggak-tonggak di Perjalananku* (Jakarta: Kinta, Bagian Penerbitan 1974). Hal. 125.

PBB. Antara tahun 1955 hingga 1960 di PBB terbentuk sebuah komunitas negara-negara Asia dan Afrika yang akrab disapa *Group of Asia and Africa* atau disingkat GAA. Dalam banyak kesempatan GAA berperan penting dalam mewujudkan isu penyelesaian Irian Barat di forum Sidang Umum PBB. Tak hanya itu, GAA turut pula berkontribusi dalam meredakan ketegangan RRC dan Amerika Serikat di Asia Timur. Dalam konflik Arab-Israel II GAA kembali berperan penting sebagai mediator. Puncaknya adalah dekolonisasi benua Afrika antara tahun 1960 hingga 1964. Dalam kurun waktu itu muncul 34 negara baru merdeka di kawasan Afrika.³

Balancing without alliances sekali lagi memasuki tataran baru saat Gerakan Nonblok (GNB) terbentuk pada bulan September 1961 di Kota Beograd, Yugoslavia. Sejak itu Dasasila Bandung sebagai sebuah norma mulai terinstitusionalisasi pada GNB. Deklarasi Brioni di Pulau Brioni Yugoslavia (1956) dan Deklarasi GNB di Kota Beograd, Yugoslavia (1961) menjelaskan bahwa Dasasila Bandung merupakan *shared values* sekaligus *historical ties* yang menjadi titik awal keberangkatan negara-negara Asia dan Afrika serta sejumlah negara di Eropa dan Amerika Latin dalam menjalin kerjasama melalui GNB. Selama era bipolarisme bentuk *balancing without alliances* menjelma menjadi berbagai skema kerjasama, seperti Kerjasama Selatan-Selatan.

Lebih dalam lagi, bagi Yugoslavia yang saat itu sedang terancam secara geografis antara kekuatan Blok Barat dan Blok Timur memilih konsep *balancing without alliances* yang sejalan dengan kebutuhan untuk mencapai *Hard-Interest* keamanan dalam negeri Yugoslavia. Sedangkan Afrika yang terwakili oleh Kwame Nkrumah (Ghana) pada pendirian GNB saat itu sedang gencar melakukan

³ Ali Sastroamidjojo.op.cit. Hal. 28.

project dekolonisasi di benua Afrika. Kehadiran Afrika di GNB diharapkan dapat memanfaatkan forum itu sebagai instrumen multilateral Afrika guna mendukung dekolonisasi Afrika.⁴ Nilai terdalam dari *Common Interest* itu tidak lain adalah upaya para Negara-negara Dunia Ketiga untuk mencegah kemunculan Perang Dunia III yang terus mengancam akibat konstelasi antara Blok Barat dan Blok Timur di masa Perang Dingin. Situasi itu ditandai dengan munculnya masa *détente* atau peredaan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

Setengah abad pasca Konferensi Asia Afrika 1955 untuk pertama kalinya 106 negara di benua Asia dan Afrika bersepakat berkumpul kembali pada tanggal 22-23 April 2005 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT Asia Afrika) 2005 di Jakarta dan sekaligus Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 24 April 2005.⁵ Pertemuan tingkat tinggi itu menandai kali pertama negara Asia dan Afrika bertemu pasca era bipolar Perang Dingin. Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan kerja sama yang dikenal sebagai Kerja sama Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika atau *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP).

NAASP dalam perspektif reflektifisme merupakan upaya untuk merawat sebuah *common interest* agar tetap relevan dengan transformasi sistem internasional. Hal serupa pernah dilakukan oleh GNB pasca runtuhnya era bipolar. Pada KTT ke-10 GNB bulan September 1992 di Jakarta, Indonesia, sebuah deklarasi bernama *The Jakarta Message* disepakati dan dianggap sebagai rujukan

⁴ *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa. Periode 1945-1950*. Departemen Luar Negeri. 1998. Hal 270.

⁵ P.L.E. Priatna (ed.), *Perayaan Emas 50 Tahun Indonesia dan KAA: Catatan dari sebuah Perhelatan, Diplomasi dan Prospek Kerjasama*, Departemen Luar Negeri RI, 2005. Hal. 27.

baru terhadap eksistensi GNB pasca Perang Dingin. Pesan utama dalam deklarasi itu adalah menggarisbawahi bahwa pasca Perang Dingin ancaman terhadap *peace and security* tetap tak terelakkan namun dalam bentuk yang berbeda.⁶

Demikian pula halnya dengan *common interest* negara-negara di Asia dan Afrika yang kembali dirumuskan ulang pada KTT Asia Afrika 2005. Bila sebelumnya pada KAA 1955 *common interest* terformulasi dalam Dasasila Bandung maka pada KTT Asia Afrika 2005 *common interest* terformulasi dalam Nawasila yang merupakan bagian puncak dari Deklarasi NAASP. Berbeda dengan Dasasila Bandung yang lebih fokus pada solidaritas politik, Nawasila sudah lebih jauh melihat secara proporsional tuntutan kerja sama yang lebih konkrit dan terstruktur serta mengakui keterlibatan aktor-aktor di luar negara-bangsa, seperti *business to business* dan *people-to-people*. Secara aklamasi para Ketua Delegasi KTT Asia Afrika 2005 mengakui Dasasila Bandung sebagai *shared values* dan *historical ties* mereka. Deklarasi NAASP buktinya masih menempatkan Dasasila Bandung pada poin pertama dalam sembilan sila Nawasila.⁷

Pada KTT Asia Afrika 2005 negara-negara Asia dan Afrika memperbaharui solidaritas mereka yang telah berjalan lama sejak peristiwa KAA 1955. KTT Asia Afrika 2005 tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan akhir, yang terpenting adalah (1) *Declaration on the New Asian African Strategic Partnership* (NAASP), (2) *Joint Ministerial Statement on the New Asian African Strategic Partnership Plan of Action*; dan (3) *Joint Asian African Leaders' Statement on Tsunami, Earthquake and other Natural Disasters*. Deklarasi NAASP tersebut,

⁶ Departemen Luar Negeri. *Document of the 10th Summit Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement*.

⁷ P.L.E. Priatna (ed.), op.cit. Hal. 28.

selain menjadi instrumentasi bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi dinamika tantangan era multipolar, juga merupakan manifestasi dari pembentukan jembatan intrakawasan dengan komitmen kemitraan strategis baru antara Asia dan Afrika yang mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu (1) solidaritas politik, (2) kerja sama ekonomi, dan (3) hubungan sosial budaya, yang di dalamnya mencakup mekanisme interaksi antar pemerintah, antarorganisasi regional/subregional serta antarmasyarakat (*people-to-people contact*).

KTT Asia Afrika 2005 dihadiri oleh perwakilan dari 106 negara Asia dan Afrika yang terdiri dari 54 negara Asia dan 52 negara Afrika. KTT menyepakati sebuah mekanisme tindak lanjut untuk proses institusionalisasi melalui pelaksanaan KTT setiap 4 tahun sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan *Business Summit*, Pertemuan Tingkat Menteri setiap 2 tahun sekali, serta *Sectoral Ministerial* dan *Technical Meeting* lainnya apabila diperlukan.

Sejak tahun 2005 Indonesia dan Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (*Co-Chairs*) NAASP. Dalam mengemban tugas sebagai *Co-Chairs*, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mengembangkan NAASP. Indonesia sejak tahun 2006 telah berhasil melaksanakan 26 program di bawah kerangka kerja sama NAASP, antara lain: (1) *NAASP-UNEP Workshop on Environmental Law and Policy* pada tahun 2006; (2) *Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* pada tahun 2007, dan (3) *Apprenticeship Program for Mozambican Farmers* pada tahun 2010. Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* tahun 2008 yang dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara dan 3 organisasi

internasional.⁸

Komitmen bagi pengembangan NAASP juga dibagi bersama dengan negara-negara peserta NAASP yang lain. Menyebutkan beberapa di antaranya, Malaysia telah melaksanakan *Training Course for Diplomats* tahun 2007 dan *Training Course in Disaster Management* tahun 2008, serta China yang telah melaksanakan *The 5th Training Program for Staff from African Chambers* tahun 2009 dan *China-Zambia Trade and Investment Forum* tahun 2010.

Dengan pandangan untuk memberikan berbagai rekomendasi bagi KTT Asia Afrika selanjutnya, *NAASP Senior Officials' Meeting (SOM)* diadakan di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Pertemuan ini berhasil membahas beberapa agenda penting, khususnya usulan *The 8 Focus Areas of Cooperation* yang dimaksudkan sebagai mekanisme panduan untuk mengarahkan berbagai skema kerja sama di bawah kerangka NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT Asia Afrika 2005 ke dalam beberapa kegiatan yang realistis dan bersifat berorientasi pada hasil.

Delapan bidang kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan ini yaitu: *Counter Terrorism; Combating Trans-national Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network*; serta *Gender Equality and Women Empowerment*. Beberapa negara Asia seperti Bangladesh, China, Jepang, Filipina, dan Thailand telah menunjukkan kesediaan untuk menjadi *Champion Countries* dari bidang kerja sama tersebut, berdampingan dengan *Champion Countries* dari

⁸Kementerian Luar Negeri. Kerjasama Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP). <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/NAASP.aspx>. Diakses pada tanggal: 1 Maret 2016.

negara Afrika. Indonesia sendiri menjadi *Champion Country* dari kawasan Asia bersama dengan Aljazair dari kawasan Afrika untuk bidang kerja sama *Counter-Terrorism*.

Dalam isu Palestina, Indonesia dan negara-negara NAASP memandang dengan prihatin fakta bahwa bangsa Palestina menjadi satu-satunya peserta KAA 1955 yang belum menikmati kemerdekaan penuh. Oleh karena itu, Indonesia memprakarsai dan menjadi tuan rumah *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-15 Juli 2008.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa NAASP berkomitmen untuk memberikan bantuan program pembangunan kapasitas bagi 10.000 warga Palestina dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2013). Pada kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengambil bagian bagi perwujudan proyek tersebut dengan menyediakan pelatihan untuk 1.000 warga Palestina.

Indonesia, Afrika Selatan, dan Palestina selaku *NAASP Capacity Building for Palestine Coordinating Unit* diberikan mandat untuk memantau dan memfasilitasi berbagai upaya negara-negara NAASP yang dilakukan dalam kerangka pembangunan kapasitas bagi Palestina. Indonesia menjalankan perannya sebagai koordinator bagi Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Hingga 2010, beberapa negara peserta NAASP telah menyampaikan laporan

implementasi komitmen pembangunan kapasitas bagi Palestina, antara lain: India (102 warga Palestina), Jepang (393 warga Palestina), Korea Selatan (182 warga Palestina), Malaysia (121 warga Palestina), Singapura (16 warga Palestina). Selaku *NAASP Co-Chair Asia Chapter*, Indonesia juga mencatat keberhasilan Turki yang telah memberikan program pembangunan kapasitas bagi 722 warga Palestina.

NAASP Capacity Building for Palestine Coordinating Unit Meeting terakhir diadakan di Amman, Jordania, 2-3 Desember 2010 dan menghasilkan *summary report* yang mencakup *progress report* dan *analytical report* implementasi pembangunan kapasitas oleh negara-negara peserta NAASP. Hasil pertemuan dimaksud akan disampaikan pada pertemuan tingkat menteri dan KTT ke-2 NAASP.

Indonesia terus berupaya untuk memenuhi komitmen bagi pembangunan kapasitas bagi Palestina tersebut. Hingga tahun 2010, Indonesia telah berhasil melaksanakan 30 program pelatihan bagi 126 warga Palestina. Pada tahun 2010, sejumlah program pembangunan kapasitas bagi Palestina telah dilaksanakan oleh Indonesia, antara lain: *Training Course on Fire Rescue*, *Training on Project Cycle*, *Training Course on Gender Mainstreaming for Officers of the Ministry of Women's Affairs*, dan *Training Course on Coal and Mineral Resources Management*.

Untuk tahun 2011, beberapa program telah ditawarkan Indonesia kepada Palestina, antara lain, yaitu: *Apprenticeship Program for Palestine's Small and Medium Enterprises (SMEs) Development*, *Medical First Responder*, *Collapse Structure Search and Rescue (CSSR)*, *School of Environmental Conservation and*

Ecotourism and Management (SECEM), Training on Project Cycle (Planning, Appraisal, and Management of Infrastructure Project) for the Apparatus of Palestine, dan Capacity building in welding sector.

Namun demikian, dalam usianya yang satu dasawarsa NAASP sebagai sebuah arena sekaligus instrumentasi negara-negara Asia dan Afrika masih dipandang skeptis akibat rendahnya perhatian publik dan kemauan politik dari negara-negara Asia dan Afrika. Selama sepuluh tahun NAASP mengalami banyak hambatan dan tantangan serta dianggap masih belum efektif karena rasa kepemilikan dari negara-negara anggotanya yang masih belum kuat.

Dalam kurun waktu itu, hanya Indonesia dan Afrika Selatan yang berperan aktif dalam melahirkan inisiatif-inisiatif kerjasama dan merealisasikan kesepakatan kerja sama NAASP. Akibatnya, efektivitas NAASP masih sangat tergantung pada Indonesia dan Afrika Selatan yang merupakan *co-chairs* NAASP. Hal ini menunjukkan belum adanya *sense of ownership* dari negara-negara anggota NAASP lain sehingga implementasi program-program NAASP masih sangat terbatas.

1.2 Identifikasi Masalah

NAASP adalah materialisasi dari idealisme *Common Interest* negara-negara di Asia dan Afrika. Pasalnya, dari sudut pandang Rasionalisme, *Common Interest* saja dianggap tidak memadai untuk mendukung pencapaian *Soft-Interest* dan *Hard-Interest* sebuah negara bangsa. Namun, setelah digulirkan pada tahun 2005, NAASP masih dianggap perlu ditingkatkan kapasitasnya sebagai sebuah mekanisme multilateral. Maka itu, NAASP kembali mendapat penguatan pada

perhelatan KTT Asia Afrika 2015. Ini terefleksi pada disepakatinya sebuah dokumen Revitalisasi NAASP.⁹

Pertemuan ini digelar sepuluh tahun pasca KTT Asia Afrika 2005. Jadi, ini adalah kali kedua negara-negara Asia dan Afrika bertemu kembali di era multipolar. Dalam hajat ini pemerintah Indonesia mengundang pemimpin dari 109 negara serta berbagai organisasi internasional untuk menghadiri KTT Asia Afrika 2015 dan rangkaian Peringatan 60 Tahun KAA. Hasilnya, sebanyak 32 kepala negara dan kepala pemerintahan menghadiri pertemuan tersebut serta 86 utusan negara hadir dan membawa pesan bagi peningkatan kerja sama dan perwujudan tata dunia yang lebih adil serta berimbang.¹⁰

Dari jumlah itu, sebanyak 22 kepala negara dan kepala pemerintahan menghadiri hingga berakhir di Bandung. Sementara ada 10 kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri rangkaian acara di Jakarta, tidak sampai ke Bandung. KTT Asia Afrika 2015 telah berhasil menyusun langkah nyata untuk menindaklanjuti kerja sama konkret yang tercantum dalam deklarasi penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika. KTT Asia Afrika 2015 menghasilkan tiga dokumen utama, yaitu (1) *Bandung Message*, (2) Revitalisasi Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), dan (3) Deklarasi Palestina. Selain itu, kesepakatan lain yang dihasilkan adalah pentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan melalui inisiatif dan program-program pengembangan kapasitas dan kerja sama

⁹The Diplomats. *Strengthening the Asia-Africa Partnership*. <http://thediplomat.com/2015/03/strengthening-the-asia-africa-partnership/> Diakses pada tanggal: 1 Maret 2016.

¹⁰Tempo.co. *Hadiri KAA, 5 Kepala Negara Ini Bawa Jet Pribadi* <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/20/118659035/hadiri-kaa-5-kepala-negara-ini-bawa-jet-pribadi> Diakses pada tanggal: 1 Maret 2016.

teknis (*Advancing South-South Cooperation*). Pesan Bandung 2015 merupakan dokumen yang berisi visi negara-negara Asia-Afrika yang ingin dicapai.

Sementara itu, penguatan NAASP berisi kerangka kerja implementasi dan tindak lanjut Pesan Bandung 2015. Deklarasi Palestina berisi poin-poin, yakni menyampaikan dukungan kepada Palestina untuk meraih kemerdekaan, rasa salut atas perjuangan dan ketabahan Palestina, mendorong solusi dua negara, mengutuk perlakuan Israel sebagai penjajah dan mengutuk serangan Israel.

Terkait institusionalisasi NAASP, KTT Asia Afrika 2015 berhasil menyusun kerangka operasional mekanisme pemantauan yang mana para menteri luar negeri diminta untuk melakukan pertemuan setiap dua tahun sekali di sela-sela Sidang Umum PBB di New York untuk terus memonitor pelaksanaan kerjasama NAASP. Mekanisme ini dianggap sebagai transformasi NAASP yang pada KTT Asia Afrika 2005 masih bersifat dorongan moral menjadi lebih terinstitusionalisasi pada KTT Asia Afrika 2015.

Bahkan, selain isu NAASP saat ini dirasa kurang menarik perhatian media nasional akibat perhatian media yang lebih tertarik memberitakan isu-isu aktual lainnya, KTT Asia Afrika 2015 dianggap kehilangan momentumnya karena ada sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang tidak hadir. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dalam posisinya sebagai Ketua Bersama NAASP mendadak membatalkan kehadirannya akibat konflik rasisme di dalam negeri. Selainnya, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Srilanka Maithripala Sirisena sebagai negara pewaris sponsor KAA 1955 juga absen. Masih ada tiga kepala negara yang tidak hadir, yakni Presiden Filipina Benigno Aquino III, Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye, dan Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim

Jong Un.¹¹

Di sisi lain, kompetisi di antara negara-negara Asia dan Afrika sangat kompleks, tidak hanya soal ekonomi. Antar negara di kawasan sering terjadi sengketa, misalnya di Laut China Selatan, yang menyebabkan negara-negara ASEAN terpecah. Selain itu, muncul inkonsistensi di antara negara-negara Asia dan Afrika dalam memandang satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Misalnya, dalam memandang Palestina sebagai sebuah koloni. Di antara negara-negara Asia dan Afrika ada yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Semisal, China, India, Mesir, Singapura, Thailand, Filipina, dan Jepang.

Di tengah keberadaan NAASP, negara-negara di Asia dan Afrika saat ini diakui kurang memiliki hubungan kerjasama intrakawasan yang bersifat institusional formal. Hal ini akan sangat kontras bila dibandingkan dengan pola hubungan negara-negara di Asia dengan benua lain yang telah dikembangkan di lembaga-lembaga seperti ASEM dan FEALAC. Saat ini tantangan utamanya adalah adanya kenyataan bahwa NAASP ternyata belum menjadi struktur formal untuk kerja sama multilateral. Akibatnya, ini menciptakan ketidakpastian tentang fungsi NAASP.

Ketidakpastian itu ditandai dengan rendahnya partisipasi negara-negara di Asia dan Afrika dalam memperjuangkan mekanisme multilateral NAASP. Justru sebaliknya, alih-alih memanfaatkan NAASP, negara-negara di Asia dan Afrika cenderung lebih memanfaatkan mekanisme bilateral.¹² Selain itu, keadaan ini

¹¹Tempo.co. *Ada 6 Pemimpin Negara Batal Hadiri KAA*<https://m.tempo.co/read/news/2015/04/22/118659886/ada-6-pemimpin-negara-batal-hadiri-kaa> Diakses pada tanggal: 1 Maret 2016.

¹² Suara.com. *Hasil KAA Sulit Terwujud.*

makin tumpang tindih dengan adanya mekanisme multilateral yang telah ada sebelumnya di antara negara-negara Asia dan Afrika, yang di antaranya adalah (1) *Sino-African Relationship*, (2) *Tokyo International Conference on African Development*, (3) *Vietnam-Africa Cooperation for Sustainable Development*, dan (4) *Indian-African Forum Summit*.

Dalam perspektif struktur, NAASP dimotori dua aktor negara, yakni Afrika Selatan dan Indonesia. Afrika Selatan tampil sebagai Ketua NAASP *Chapter* Afrika dan Indonesia tampil sebagai Ketua NAASP *Chapter* Asia. Di sisi Afrika, Uni Afrika adalah sebuah struktur yang potensial. Uni Afrika cukup merepresentasikan Afrika di NAASP. Bahkan, saat ini muncul wacana agar Uni Afrika mengadopsi secara resmi NAASP ke dalam mekanisme Uni Afrika. Uni Afrika saat ini mewadahi 54 negara-negara di Afrika. Namun sayangnya, sebagian besar anggota Uni Afrika masih dapat dikategorikan sebagai aktor tradisional yang masih berfokus pada urusan *Hard-Interest* berupa perbaikan ekonomi nasional, dan keamanan regional akibat konflik etnis dan tumpang tindih wilayah geografis. Di sisi Asia, tidak ada struktur yang representatif sebagaimana halnya Uni Afrika. ASEAN tidak cukup representatif bagi Chapter Asia. Tapi, sebagian besar negara di kawasan Asia adalah aktor *post-modern*.

Meskipun Deklarasi NAASP pada tahun 2005 menyatakan bahwa NAASP tidak ditujukan untuk menduplikasi bentuk-bentuk kerja sama multilateral yang sudah ada lebih dahulu di kawasan Asia dan Afrika, NAASP sebagai sebuah mekanisme kerjasama multilateral ternyata masih belum mampu mengakomodir

kebutuhan pemenuhan *soft-interest* dan *hard-interest* negara-negara Asia dan Afrika.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian dibatasi dari tahun 2005 saat Deklarasi NAASP disepakati oleh 106 negara Asia dan Afrika pada KTT Asia Afrika 2005 sampai tahun 2015 saat muncul Deklarasi Revitalisasi NAASP pada KTT Asia Afrika 2015 yang disepakati oleh 109 negara Asia dan Afrika. Alasan pembatasan waktu tahun itu dimaksudkan untuk memfokuskan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi NAASP sejak pertama kali digulirkan hingga dianggap perlu untuk direvitalisasi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Sekaitan itu, maka pertanyaan riset yang akan dijawab Penulis dalam usulan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam membangkitkan Solidaritas Asia Afrika melalui NAASP?
2. Apa yang menyebabkan NAASP tidak berjalan seperti yang diharapkan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terdiri atas tiga hal, yakni:

1. Mengetahui penyebab kurang berhasilnya NAASP.
2. Mengetahui proses institusionalisasi NAASP.
3. Mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam NAASP.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis maupun teoritis bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya secara spesifik yang berkaitan dengan topik Kerjasama Kemitraan Strategis. Adapun secara terperinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan gambaran mengenai masalah-masalah terkait NAASP.
2. Digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Digunakan sebagai rujukan perancangan komunitas Forum Studi Asia Afrika.
4. Memenuhi salah satu syarat Ujian Sidang Sarjana Strata Dua (S2) pada Jurusan Hubungan Internasional, Magister Ilmu Sosial, Universitas Katholik Parahyangan.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka NAASP dalam proses penelitian tesis ini dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber. Sumber kajian pustaka yang pertama terdiri atas sejumlah pustaka yang mengupas genealogi politik luar negeri Indonesia. Asal usul lahirnya kepentingan nasional Indonesia dan orientasi pembangunan keseimbangan yang ditempuh kebijakan luar negeri Indonesia mulai era Orde Lama, era Orde Baru hingga era Reformasi. Pemaparan genealogi politik luar negeri Indonesia itu berkelindan dengan metode penelitian pada tesis ini, yaitu paradigma Tradisionalis.

Dalam paradigma itu, adagium ‘Sejarah Selalu Berulang’ adalah proposisi utamanya. Maka, dinamika orientasi Indonesia-Afrika dapat ditelusuri dari genealogi politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya, sumber kajian pustaka yang kedua adalah referensi literatur yang menyajikan ulasan perihal NAASP. Di antaranya terdapat sebuah hasil penelitian perihal NAASP berbentuk tesis. Selain itu, masih ada kajian NAASP dalam bentuk hasil laporan FGD evaluasi NAASP, dan ulasan kelahiran NAASP. Terakhir, dua buku perihal kemitraan strategis antara China-Uni Eropa dan Afrika-Uni Eropa. Dua buku itu dipilih atas dasar pertimbangan bahwa kedua bentuk kemitraan strategis China-Uni Eropa dan Afrika-Uni Eropa memberikan banyak pelajaran sekaligus instrumen analisa bagi Penulis untuk mengkaji NAASP.

1.4.1 Politik Luar Negeri Indonesia

Buku *Indonesian Political Thinking (1945-1965)* yang diedit oleh Herbert Feith, dan Lance Castles dan diterbitkan pada tahun 1970 oleh *Cornell University* menggambarkan genealogi format politik luar negeri Indonesia. Di buku itu Menteri Luar Negeri Soebandrio menulis artikel berjudul *Revolutionary Diplomacy (1962)*. Menurutnya, politik luar negeri Indonesia harus menjadi instrumen pencapaian kepentingan revolusi Indonesia. Sekaitan itu, orientasi politik luar negeri dikerahkan sepenuhnya untuk mencapai perimbangan melalui negara-negara yang memiliki visi revolusioner demi kepentingan nasional dan keamanan nasional. Di masa Orde Lama Afrika menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan sebagai mitra aliansi Indonesia.

Selanjutnya, transformasi orientasi politik luar negeri makin eksplisit dijelaskan pada buku *Indonesia's Foreign Policy* yang ditulis oleh Michael Leifer dan diterbitkan pada tahun 1983 oleh *The Royal Institute of International Affairs*. Michael Leifer menggambarkan transformasi politik luar negeri Indonesia dalam bab bertajuk *From Confrontation to Confrontation* (Era Orde Lama) dan *A New Course in Foreign Policy* (Era Orde Baru). Buku ini menghadirkan perspektif tajam perihal peralihan orientasi politik luar negeri Indonesia. Ada perbedaan orientasi yang signifikan antara era Orde Lama dan era Orde Baru. Orientasi ke Utara yang lebih dianggap sebagai sokoguru pencapaian kepentingan nasional dengan gamblang digambarkan. Akibat transisi orientasi itu, skala prioritas Indonesia terhadap Afrika bergeser.

Selain faktor orientasi, perihal politik luar negeri Indonesia yang kental dipengaruhi oleh faktor geopolitik diulas mendalam oleh Ganis Harsono dalam bukunya yang berjudul *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Buku ini diterbitkan oleh CV Haji Masagung pada tahun 1989 di Jakarta. Pengalamannya sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri di era Orde Lama membuka tabir geopolitik Indonesia. Sudah sejak era Orde Lama, Soekarno mengkhawatirkan akan kebangkitan hegemoni China dan pengaruhnya terhadap poros hubungan negara-negara Asia dan Afrika pasca KAA. China tampil begitu aktif di Afrika setelah dekolonisasi benua Afrika pada era 1960 akibat KAA 1955. Kehadiran China di Afrika kemudian menghadirkan fenomena baru dalam hubungan internasional di Afrika.

Masih perihal politik luar negeri Indonesia, Leo Suryadinata menawarkan banyak fakta menarik tentang hilangnya dukungan Afrika terhadap Indonesia di

berbagai forum internasional. Ia dengan apik mendeskripsikan peristiwa-peristiwa hilangnya *voting power* Afrika terhadap Indonesia di era Orde Baru. Akibat peralihan orientasi politik luar negeri Indonesia di era Orde Baru dan integrasi Timor Portugis ke wilayah Indonesia, kehadiran Indonesia di Gerakan Nonblok kerap menuai sikap curiga dari negara anggota lainnya. Semua itu ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1998 di Jakarta oleh LP3ES.

Kepentingan rezim di Indonesia dan relasinya terhadap orientasi politik luar negeri ditulis oleh Dr. Ade Priangani dalam bukunya *Politik Luar Negeri Indonesia*. Buku ini diterbitkan pada bulan Oktober 2014. Menurutnya, sikap Indonesia terhadap Kemitraan Strategis berubah-ubah sesuai kepentingan rezim. Awalnya adalah Abdurahman Wahid yang merintis kemitraan strategis bersama China dan India. Walau tidak berjalan sesuai diharapkan di awal, sebagai upaya rintisan upaya itu telah meletakkan fondasi penting bagi para rezim-rezim selanjutnya, termasuk NAASP.

Kemudian, sebuah buku bertajuk *Hubungan Indonesia-Afrika: Perspektif Ekonomi Politik* yang dicetak pada bulan Februari 2015 oleh Lentera Publishing memberi gambaran terkini hubungan antara Indonesia dan Afrika. Arisman dan Mohammad Anthoni dalam buku itu menuliskan tiga isu utama dalam hubungan Indonesia-Afrika, yakni 1) Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Afrika, 2) Potensi Hubungan Ekonomi-Afrika, dan 3) Afrika sebagai Kawasan Potensial Masa Depan.

1.4.2 NAASP

Penelitian tentang NAASP pernah dilakukan lewat tesis F.X. Wawolangi dengan judul *Politik Luar Negeri Republik Indonesia melalui KTT Asia Afrika 2005*. Dalam penelitian deskriptifnya, F.X. Wawolangi berusaha menjawab bagaimana penggunaan *soft power* dalam Politik Luar Negeri RI dalam studi kasus Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005.¹³ F.X. Wawolangi menemukan bahwa KTT Asia Afrika 2005 adalah *even* yang monumental, karena selain KTT tersebut sebagai peringatan pelaksanaan KAA 1955, KTT tersebut menawarkan suatu kerja sama baru di antara negara-negara Asia Afrika yang mana pada saat itu saat wajah dunia berubah ketika serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001 yang kemudian disusul selanjutnya dengan tindakan unilateralisme AS dalam memaksakan negara-negara lain di dunia untuk menyelamatkan dirinya masing-masing.

Pada momen itu, Indonesia sebagai negara yang baru saja mengalami transformasi politik diharapkan untuk segera mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu Indonesia kembali menawarkan bentuk kerja sama baru yang lebih konkrit dan membangun dalam bentuk NAASP yang disepakati dalam KTT Asia Afrika 2005. Politik Luar Negeri RI melalui KTT Asia Afrika 2005 dapat dikatakan sebagai perwujudan dari teori *soft power*. Sejauh mana KTT Asia Afrika 2005 dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu akan menentukan keefektifan dari *soft power* itu. Tesis F.X. Wawolangi menggunakan pendekatan teori *soft power*, Joseph Nye sebagai

¹³ F.X. Wawolangi. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia Melalui KTT Asia Afrika 2005*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

dasar pemikirannya. Selain itu untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya, digunakan teori 3 unit analisa Howard Letner.

Selanjutnya, buku berjudul *Focus Group Discussion: Prospek NAASP sebagai Perekat Solidaritas dan Kerjasama Asia-Afrika*. Buku ini adalah laporan hasil kegiatan FGD dan diterbitkan oleh BPPK Kementerian Luar Negeri pada tahun 2010. FGD itu dihelat pada hari Kamis, 28 Oktober 2010 di Jakarta. Dalam kegiatan itu BPPK menghadirkan lima pembahas, yakni 1) Andri Hadi (Plt. Kepala BPPK Kemlu), Arto Suryodipuro (Direktur KIK Aspasaf Kemlu), Dubes Djismun Kasri (mantan Dubes RI di Nairobi, Kenya), Dr. Muyanja Ssenyonga (peneliti dari Uganda), dan Drs. Bantarto Bandoro, M.A. (dosen pengajar pada *President University*).

Plt. BPPK Kemlu, Andri Hadi menyampaikan bahwa NAASP dinilai sebagai forum penting untuk menjembatani penguatan hubungan Asia-Afrika dan menciptakan kemitraan strategis bagi kedua kawasan. Namun demikian, NAASP dihadapkan pada tantangan terkait bagaimana forum ini dapat memberikan manfaat kongkret bagi kedua kawasan serta mampu menjawab tantangan-tantangan global. NAASP dipandang penting dalam menjembatani penguatan hubungan Asia-Afrika dalam menciptakan kemitraan strategis kedua kawasan. Sayangnya, NAASP juga dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain masih kurangnya *ownership* negara anggota, serta adanya kecenderungan kepentingan nasional dalam mekanisme NAASP. Dalam hal ini, dinilai penting untuk mencari terobosan baru dalam menguatkan serta mengefektifkan NAASP bagi kepentingan kedua kawasan Asia dan Afrika.

Selanjutnya, Direktur KIK Aspasaf Kemlu, Arto Suryodiputro menyampaikan beberapa hal penting, yaitu: 1) Upaya untuk melakukan asesmen kembali NAASP, walaupun dalam usianya yang masih relatif masih baru dinilai tepat dan sesuai dengan arahan Menlu RI untuk meninjau kembali tatanan kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini telah dilaksanakan, 2) NAASP dinilai penting sebagai sebuah forum yang dapat menghubungkan Asia dan Afrika sehingga tidak terdapat *missing link* antara kedua benua sebagaimana telah berkembang bentuk arsitektur regional lainnya seperti ASEM, FEALAC, APEC, dll., 3) Indonesia sebagai *co-chairman* NAASP (2005-2009) selama ini telah berperan aktif dalam program NAASP melalui kemitraan NAASP dan 24 program komitmen *capacity building* untuk Palestina. Dalam periode tersebut, NAASP telah berhasil merumuskan 8 *Focus Area of Cooperation* (*counter terrorism, combating transnational organized crime, food security, energy security, SMEs, Tourism, Asian-African Development University Network, dan Gender Equality and Women Empowerment*), 4) Manfaat atau potensi NAASP bagi kepentingan Indonesia, yaitu memperkuat postur politik dan kredibilitas Indonesia (sebagai *branding*) dan dapat digunakan untuk menyuarakan kepentingan nasional dalam masalah Palestina, dan 5) Tantangan yang dihadapi NAASP kedepannya, yaitu keberlanjutan dari forum ini dikarenakan hingga kini belum ada kandidat *co-chairman* yang akan menggantikan Indonesia dan Afrika Selatan yang dinilai representatif. Tantangan lainnya adalah penyelenggaraan *Summit NAASP* serta bagaimana memperkuat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika terhadap NAASP.

Sedangkan mantan Duta Besar RI di Nairobi, Kenya, Djismun Kasri

menyatakan bahwa pembahasan mengenai kepentingan Indonesia dalam NAASP tidak dapat dipisahkan dari 3 hal penting, yaitu perubahan dan perkembangan di Afrika, kepentingan negara-negara penting di kawasan dan di dunia, dan bagaimana kepentingan Indonesia di Afrika dan NAASP. Terkait itu, ia menyampaikan bahwa 1) Mendukung dan menilai tepat upaya evaluasi kepentingan Indonesia dalam NAASP selama ini khususnya dengan masa berakhirnya masa *co-chairmanship* Indonesia, 2) Afrika dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami berbagai kemajuan di bidang ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan demokrasi. Semakin stabilnya kawasan serta ditemukannya sumber energi yang besar (di Gabon, Angola, Somalia, dan Sudan) menjadikan Afrika sebagai kawasan yang diperebutkan negara-negara besar seperti China, India, Korea Selatan, dll. untuk memperkuat pengaruh dan pencapaian kepentingan negara-negara tersebut, 3) NAASP tidak perlu menjadi prioritas kebijakan Indonesia terhadap kawasan Afrika mengingat kurangnya minat negara-negara Asia lainnya serta banyaknya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program NAASP, dan 4) Indonesia hendaknya lebih fokus pada kerjasama bilateral Indonesia-Afrika sehingga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut secara lebih maksimal. Untuk melaksanakannya, maka Indonesia perlu merumuskan strategi kebijakannya terhadap kawasan Afrika untuk jangka panjang secara lebih terpadu.

Peneliti dari Uganda, Dr. Muyenja Ssenyonga menyampaikan tiga hal penting, yaitu 1) Dinilai penting bagi Indonesia untuk memiliki tujuan yang jelas dari NAASP baik dalam segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika tujuan itu adalah untuk kepentingan nasional, maka perlu dipertimbangkan untuk

menggunakan mekanisme penguatan hubungan bilateral, 2) NAASP dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kepentingan yang *diverse* dari negara-negara anggotanya yang berasal dari kawasan Asia dan Afrika. Oleh karena itu, NAASP perlu merujuk kepada *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD) dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan NEPAD ke dalam program-programnya sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh negara-negara Afrika, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TICAD, dan 3) NAASP akan menjadi lebih relevan dan bermanfaat jika forum itu dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan, dan bukan sekedar mengedepankan semangat nostalgia.

Terakhir, dosen *President University*, Bantarto Bandoro menyebutkan tiga hal penting perihal NAASP, yaitu: 1) Terdapat perubahan yang fundamental di Afrika, karena negara-negara di kawasan itu kini sudah jauh lebih terbuka, dan mulai memahami perubahan-perubahan serta peluang-peluang global yang ada. Pada saat yang bersamaan, terdapat kecenderungan dari negara-negara Asia untuk melakukan *widening* dan *deepening* kerjasama dengan Afrika, 2) Kemitraan sejumlah negara-negara-negara Asia dengan Afrika dinilai sebagai sesuatu yang alami dan tidak perlu ditakuti, karena bukan merupakan ancaman bagi NAASP, namun lebih sebagai tantangan bagi Indonesia dalam upayanya untuk menjaga *sustainability* dari NAASP, 3) Upaya untuk menjaga *sustainability* NAASP tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat interaksi pada tiga lapis yang saling terkait, yaitu forum antar pemerintah, organisasi sub-regional, dan interaksi antar rakyat, utamanya kalangan bisnis, akademika, dan masyarakat madani.

Kelahiran NAASP juga dapat ditelusuri dari buku berjudul *Perayaan*

Emas 50 Tahun Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika. Buku ini disusun oleh P.L.E Priatna dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri pada bulan Agustus 2005. P.L.E Priatna dalam buku ini mengungkap peran Bandung sebagai rantai sejarah Asia-Afrika, peran Indonesia di tengah perjuangan Asia-Afrika dalam diplomasi membangun sebuah kemitraan, rangkaian persiapan menuju perhelatan akbar KTT Asia-Afrika 2005, dan terakhir penyelenggaraan KTT Asia-Afrika 2005.

Buku ini kaya akan data perihal NAASP mulai dari Fase Pembukaan, Fase Perumusan, hingga Fase Pengesahan. Dalam bab yang berjudul 'Peran Bandung sebagai Rantai Sejarah Asia-Afrika', Konferensi Asia Afrika atau dikenal sebagai Konferensi Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung tidak dapat dipungkiri telah mengilhami, dan memberikan dorongan serta mewarnai perubahan tatanan politik internasional. Konferensi Bandung dikenal oleh negara-negara Asia dan khususnya Afrika karena telah menjadi inspirasi bagi negara-negara Afrika untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan, dan berhasil menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat.

Selanjutnya, Fase Pembukaan dan Fase Perumusan NAASP disajikan pada bab berjudul 'Diplomasi Membangun sebuah Kemitraan: Indonesia di Tengah Perjuangan Asia-Afrika'. Beberapa hal penting yang menjadi sorotan pada bab ini adalah peristiwa kemunculan *Phnom Penh Initiative* yang mengawali kelahiran NAASP pada KTT ke-8 ASEAN di Kamboja pada bulan November 2002. Selain itu, bab ini juga memberikan ilustrasi lengkap perihal *Asian-African Sub-Regional Organization Conference I*, Pertemuan Kelompok Kerja AASROC, *Asian-African Sub-Regional Organization Conference II*, Pertemuan Pejabat Tinggi Asia-Afrika,

Pertemuan Konsultasi Pejabat Tinggi Asia-Afrika, dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Asia-Afrika.

Kemudian, bab berjudul 'Rangkaian Persiapan Menuju Perhelatan Akbar KTT Asia-Afrika 2005' menjelaskan hal-hal seperti Persiapan Panitia Nasional, Penyiapan Kerangka Acuan (ToR), *lobby* ke Negara-negara Kunci, Persiapan Bidang-bidang pada Panitia Nasional, Persiapan Substansi, Tema Konferensi, Acara dan Persidangan hingga Acara dan Persidangan. Terakhir adalah bab berjudul Penyelenggaraan KTT Asia-Afrika 2005. Bab ini menjelaskan tentang proses berjalannya KTT Asia-Afrika 2005 dan berikut hasilnya.

Khusus hasil-hasil KTT Asia Afrika 2005, seperti dokumen 1) *Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership*, 2) *Plan of Action of the New Asian-African Strategic Partnership*, dan 3) *Joint Asian-African Leader's Statement on Tsunami, Earthquake and Other Natural Disaster* dipaparkan dalam buku berjudul *The Asia Africa Towards the First Century*. Buku ini disusun oleh tim yang diketuai oleh Joop Ave dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2005.

Kemudian, buku berjudul *Key AASROC Documents* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri pada bulan Juli 2003 usai pelaksanaan Konferensi AASROC I di Bandung pada tanggal 29-30 Juli 2003. Buku ini menghadirkan informasi Fase Perumusan NAASP. Daftar pidato delegasi peserta konferensi AASROC I dan rancangan kesepakatan perumusan NAASP dalam buku ini memberikan gambaran utuh perihal kelahiran NAASP.

Pasca KTT Asia Afrika 2005 bunga rampai perjalanan NAASP sejak Fase Pengesahan pada tahun 2005 hingga Fase Implementasi pada tahun 2006

dijelaskan dalam buku berjudul *Asian-African Conference at a Glance*. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2007. Sedangkan, perjalanan NAASP antara tahun 2010 hingga 2014 dapat diakses melalui buku *Diplomasi Indonesia* yang terbit pada tahun 2010, 2011, 2013, dan 2014. Buku ini yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri secara berkala membahas semua capaian diplomasi Indonesia di tahun 2014 termasuk NAASP.

1.4.3 Kemitraan Strategis

Kajian pustaka perihal kemitraan strategis sebagai sebuah kerangka kerjasama pada proses penelitian tesis ini merujuk secara komparatif pada dua buah buku bertajuk *Africa and the European Union* (2012) dan *Conceptual Gaps in China-EU Relations* (2012). Buku yang pertama, *Africa and the European Union* (2012) adalah sebuah kompilasi kajian dari sejumlah peneliti yang mengkaji hubungan kerjasama antara Afrika dan Uni Eropa. Buku yang dieditori oleh Jack Mangala ini tak hanya menggali sampai sejauh mana implementasi kemitraan strategis antara Afrika dan Uni Eropa tapi juga - bahkan lebih jauh lagi - mengupas faktor-faktor penting yang melatari kepentingan Afrika dalam kemitraan strategis dimaksud.

Sedangkan, buku yang kedua, *Conceptual Gaps in China-EU Relations* (2012) sedikit banyak telah membantu Penulis dalam memahami tantangan-tantangan yang umumnya terjadi pada proses implementasi sebuah kerangka kerjasama kemitraan strategis. Editor buku, Zhongqi Pan menganalisa sejumlah kesenjangan yang terjadi antara China dan Uni Eropa dalam kaitan kerjasama kemitraan strategis.

Terlepas dari perbedaan arsitektur institusional dan karakter antara NAASP dan kedua kemitraan strategis Afrika-Uni Eropa dan China-Uni Eropa, pengkajian atas keduanya banyak membantu menyediakan berbagai instrumen analisa mulai dari onotologis hingga epistemologis yang bermanfaat bagi proses pengkajian NAASP pada penelitian tesis ini.

Kemudian, sebuah buku bertajuk *Isu Global dalam Kemitraan Strategis Indonesia: Peningkatan Kerjasama pada Penanganan Isu Global untuk Mendukung Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia*. Buku ini yang diterbitkan oleh BPPK Kemlu pada bulan Desember 2013 menyajikan kajian perihal kemitraan strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia terhadap sejumlah negara mitra Indonesia. Kajian ini bermanfaat bagi Penulis dalam melakukan penelitian terhadap NAASP.

Terakhir adalah sebuah buku yang ditulis oleh Jamie Mackie pada tahun 2005 menjelang perhelatan KTT Asia Afrika 2005. Buku ini ia judul *Bandung 1955: Non-Alignment and Afro-Asian Solidarity*. Selain mengisahkan dengan rinci peristiwa bersejarah KAA 1955, Jamie Mackie juga mengetengahkan perihal yang relevan dengan situasi proliferasi kepentingan negara-negara kunci di Asia di kawasan Afrika saat ini. Secara khusus ia membahasnya dalam dua buah bab, yakni bab yang berjudul *Troubled Aftermath: Afro-Asian Solidarity Crumbles, 1955-1965* dan bab yang berjudul *Looking Back: Just Symbolism, or Substance Too?*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab perumusan masalah di atas, Penulis menggunakan teori dan konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, yakni Teori Multilateralisme dan konsep Kemitraan Strategis. Penulis dalam penelitian tesis ini menggunakan keduanya sebagai pendekatan untuk mengkaji NAASP. Proposisi-proposisi utama berikut variabel dari teori multilateralisme dan konsep kemitraan strategis menjadi pisau bedah Penulis untuk membedah NAASP.

1.5.1 Multilateralisme

John Gerrard Ruggie dalam bukunya bertajuk *Multilateralism Matters* (1993) menjelaskan bahwa multilateralisme dapat dipahami sebagai nominal dan substantif. Sebagai nominal, multilateralisme cenderung diartikan secara kuantitatif di mana jumlah negara yang terlibat dalam sebuah upaya koordinasi antar negara menjadi fokus perhatian analisa. Namun demikian, multilateralisme juga memiliki makna kualitatif. Secara kualitatif, multilateralisme menjelaskan norma dan institusi multilateral. Norma multilateral bersifat abstrak dan terkait pada nilai. Selanjutnya, institusi multilateral memiliki karakter konkrit dan merujuk pada hal-hal terkait institusi dari sebuah mekanisme multilateral.¹⁴

Menurut Ruggie, sebelum terjadi proses institusionalisasi multilateral ada fase yang disebutnya sebagai rezim. Lalu, rezim mengalami proses institusionalisasi. Proses institusionalisasi itu mengubah rezim menjadi sebuah institusi alias suatu organisasi legal formal. Maka, institusi dipandang sebagai perwujudan dari suatu rezim melalui suatu proses institusionalisasi. Selanjutnya,

¹⁴ John G. Ruggie, *Multilateralism: The Anatomy of an Institution, International Organization*, 46 (3) (Summer, 1992). Hal. 8.

rezim merupakan perangkat lunak dari sebuah institusi. Sekaitan itu, analisa seputar rezim sebaiknya menurut Ruggie tidak dimulai dari institusi atau ke mana rezim organisasi internasional terinstitusionalisasi, melainkan justru pada proses institusionalisasinya.¹⁵

Ruggie menjelaskan, ada tiga hal penting terkait multilateralisme sebagai sebuah norma, yaitu Institusionalisasi Rezim, Modalitas Multilateralisme, dan Bilayer Rezim Internasional.¹⁶ Berikut ini adalah penjelasannya. **Pertama** adalah 'Institusionalisasi Rezim'. Dalam sebuah rezim terdapat idealisme. Idealisme itu adalah kesamaan keyakinan dan pandangan hidup. Keyakinan dan pandangan hidup itu hidup dalam alam idealisme para penganutnya. Komunikasi di antara penganut keyakinan itu pada akhirnya berbuah komitmen. Selanjutnya, komitmen itu membidani lahirnya suatu rezim internasional atau manifestasi praktis atas keyakinan dan pandangan hidup tadi. Akhirnya, didirikanlah suatu institusi internasional untuk melestarikan dan mengembangkan rezim tersebut.¹⁷

Kedua adalah 'Modalitas Multilateralisme'. Ada dua modalitas yang menjadi konsekuensi logis dari definisi multilateralisme, yaitu 1) indivisibilitas (*indivisibility*) dan 2) ekspektasi akan keuntungan timbal-balik jangka panjang (*diffuse reciprocity*).¹⁸ Modalitas pertama, yaitu indivisibilitas adalah keuntungan yang mutlak - relatif didapat oleh setiap pihak yang berpartisipasi dalam suatu rezim. Indivisibilitas berasal dari fase pembentukan awal rezim di mana terdapat prinsip-prinsip umum yang menyatukan para partisipan rezim. Keuntungan mutlak pada modalitas indivisibilitas merupakan alasan paling utama

¹⁵ *Ibid.* Hal. 10.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 11.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 12.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 13.

bagi setiap pihak untuk ikut menyelenggarakan rezim dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkannya. Modalitas kedua, yaitu *diffuse reciprocity* adalah fase akibat dari modalitas pertama. Artinya, jika modalitas pertama tercapai, maka efek dari rezim yang disepakati tersebut tentunya bertahan untuk kurun waktu yang panjang, bahkan selama-lamanya karena ekspektasi akan keuntungan timbal-balik jangka panjang terwujud. Dua modalitas multilateralisme itu menjelaskan bahwa pekerjaan rumah terberat bagi suatu rezim agar dapat sukses adalah mengkonstruksi suatu indivisibilitas yang dapat merangkul kepentingan, ekspektasi, bahkan identitas segenap partisipan di satu sisi, dan di sisi lain meyakinkan segenap partisipan tadi bahwa partisipasi dalam rezim adalah pilihan terbaik sekaligus yang dapat menyelamatkan mereka.

Ketiga adalah ‘Bilayer Rezim Internasional’. Ini memiliki dua lapis penyusun. Lapis pertama adalah unsur konstitutif dan kedua adalah unsur regulatif. Unsur regulatif adalah yang paling sederhana. Unsur regulatif meliputi seperangkat prinsip, aturan, tujuan, dan prosedur pengambilan kebijakan. Unsur konstitutif memiliki sifat yang sangat berbeda. Unsur konstitutif merupakan konteks pemahaman intersubyektif di mana unsur-unsur regulatif tadi menjadi mungkin untuk diciptakan, dimengerti, dan akhirnya dijalankan. Unsur konstitutif ini bukan merupakan suatu konstanta universal, banyak faktor yang mempengaruhinya. Unsur konstitutif bisa jadi merupakan respon kolektif atas suatu permasalahan global. Namun unsur konstitutif bisa juga merupakan efek dari negara hegemon. Satu hal yang pasti unsur konstitutif ini dapat secara fleksibel berubah seiring berjalannya waktu atau berubahnya konstelasi politik internasional.

1.5.2 *Strategic Partnership*

Strategic Partnership bukan merupakan sebuah konsep baru. Dalam ilmu dan praktek ekonomi, *Strategic Partnership* adalah konsep yang sudah lama digunakan. Sejak abad ke-17, Inggris Raya telah mengenal *Partnership Act*, yang digunakan dalam konteks jual beli barang. Dalam praktek diplomasi, pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an, dalam dokumen *Uni Soviet - Iraqi Strategic Partnership*. Sejak itu, konsep *Strategic Partnership* semakin banyak digunakan namun belum mempunyai definisi yang jelas dan latar belakang penggunaannya.¹⁹

Konsep *Strategic Partnership* menandai era diplomasi multilateral pada sistem internasional multipolar. Berbeda dengan era sebelumnya di masa sistem internasional bipolar, kehadiran organisasi internasional terbukti efektif sebagai instrumentasi politik luar negeri sebuah negara untuk memberikan efek *deterrence* guna mencapai *balancing of power*.²⁰ Sejak tahun 1990-an pasca Perang Dingin sejumlah negara di dunia mulai kerap menggunakan terminologi *Strategic Partnership* untuk memberi identitas baru dalam hubungan bilateral mereka. Penggunaan kata *Strategic Partnership* merujuk pada kerjasama bilateral dan multilateral tanpa aliansi. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dipahami terutama di era bipolarisme, seperti perjanjian kerjasama formal untuk militer dalam menghadapi ancaman bersama. Sejak itu, terminologi *Strategic Partnership* dan *Strategic Relationship* digunakan secara luas di seluruh

¹⁹ *Isu Global dalam Kemitraan Strategis Indonesia: Peningkatan Kerjasama pada Penanganan Isu Global untuk Mendukung Pelaksanaan Politik Luar Negeri*. BPPK Kemlu: Jakarta (Desember 2013). Hal. 16.

²⁰ Deon Geldenhuys, *The Comprehensive Strategic Partnership Between South Africa And Russia*, *Strategic Review for Southern Africa*, Vol 37, No 2 <http://www.up.ac.za/media/shared/85/Strategic%20Review/Vol%2037%20%282%29/geldenhuys-pp118-145.zp74595.pdf> Diakses pada tanggal: 1 Maret 2016.

dunia hingga kini. *Strategic Partnership* juga memiliki beberapa variasi. Misalnya, *Constructive Strategic Partnership*, *Comprehensive Strategic Partnership*, *Privileged Strategic Partnership*, dan *Fundamental Partnership*.

Namun demikian, *Strategic Partnership* dalam Hubungan Internasional masih menjadi bahan perdebatan. *Strategic Partnership* secara umum memang diakui menawarkan proposisi utama, seperti kerjasama tanpa aliansi dan bersifat jangka panjang. *Strategic Partnership* memperlihatkan keragaman yang luar biasa pada hal-hal seperti norma, tujuan, dan ruang lingkup isu serta struktur yang diciptakan. Akibatnya, penggunaan terminologi *Strategic Partnership* sering dianggap kurang tepat untuk mengidentifikasi begitu beragamnya jenis hubungan kerjasama di dunia.

Selain itu, konsep *Strategic Partnership* sering digunakan secara longgar untuk melabeli berbagai bentuk kerjasama. Keadaan itu sering menyebabkan implementasi konsep *Strategic Partnership* jadi kehilangan makna substantifnya. Fakta-fakta itu membuktikan betapa konsep *Strategic Partnership* masih dianggap sebagai konsep kebijakan yang masih diperdebatkan.

Bila *Strategic Partnership* diasumsikan sebagai sebuah *Cooperative Relationship* atau sejenis bentuk aliansi di antara negara-negara, maka definisi *Strategic Partnership* dapat dipahami melalui sebuah kasus berikut ini, yakni *Strategic Partnership* berada di antara bentuk *Formal Agreement* dalam kerjasama militer di masa peperangan dan bentuk *Bilateral Agreement* dalam kerjasama yang terbatas di bidang perdagangan dan telekomunikasi. Fakta ini dapat dijelaskan dalam sebuah proposisi ini, yaitu :

*“Two governments agree to raise the level of their regular interactions to embrace levels from the lowest to the highest, to deal with the great variety of issues that concern each of them in a cordial and holistic manner seeking cooperation and understanding, and to make long-term commitments for mutual benefit and furthering their respective goals, but do not enter into alliance”.*²¹

Dengan definisi ini *Strategic Partnership* dimungkinkan dapat mencakup berbagai ruang lingkup isu. Sebab, pada praktiknya *Strategic Partnership* cenderung lebih komprehensif tinimbang fokus pada satu isu saja. Di sisi lain, *Strategic Partnership* yang diterapkan di Eropa memiliki ciri khas antara lain adalah:

“A complex network of institutional forums and thematic dialogues that incorporate from technical working groups to meetings of Head of States and Chief of Government.”

Tapi, ada pula pendapat bahwa *common values, shared interest, dan mutual understanding* adalah kriteria paling esensial dari sebuah kesuksesan *Strategic Partnership*. Terkait pandangan itu, *Strategic Partnership* dianggap bukan sebuah perjanjian kontraktual belaka namun bahkan bernilai lebih dari itu. Selanjutnya, kohesivitas negara-negara yang terlibat dalam sebuah *Strategic Partnership* dapat

²¹ Deon Geldenhuys, op.cit. Hal. 121.

dilihat dari nilai dasarnya berupa *shared values* dan ikatan sejarah. Selain kohesivitas, model *Strategic Partnership* berevolusi mulai dari (1) *partnership*, (2) *consultative partnership*, (3) *strategic partnership*, (4) *comprehensive strategic partnership*, (5) dan *special and privileged strategic partnership*.

Strategic Partnership Models yang digunakan sebagai metodologi untuk mengeksplorasi sebuah model kemitraan memiliki tiga proposisi dasar, yakni (1) *formation*, (2) *implementation*, dan (3) *evaluation*. Untuk *formation*, ada empat variabel, yakni (1) *environmental uncertainty*, (2) *strategic fit*, (3) *system principle*, dan (4) *elite movement*. Lalu, *implementation* disokong empat variabel, yakni (1) peraturan, (2) kebijakan dan prosedur kemitraan, (3) unsur birokrasi, dan (4) ruang lingkup kerjasama. Terakhir adalah evaluasi dengan tiga kriteria, yakni (1) hubungan antar anggota negara, (2) proses pencapaian tujuan, (3) *mutual perception*.²²

Selain itu, secara konsepsi *Strategic Partnership* merupakan upaya dan kesepakatan antar dua negara dalam meningkatkan hubungan bilateralnya ke tingkatan yang lebih lagi. Dari segi definisi, *Strategic Partnership* memuat ide untuk secara bersama-sama melaksanakan *effective multilateralism* dalam meraih kepentingan bersama. Selain itu, *Strategic Partnership* juga menekankan pada kerjasama jangka panjang yang stabil di mana perbedaan ideologi, sistem sosial, dan *individual event* tidak menjadi penghambat utama. Di atas hal tersebut, masing-masing aktor yang sepakat dalam *Strategic Partnership* harus berada

²² Deon Geldenhuys, op.cit. Hal. 124.

dalam posisi yang sama dan untuk kepentingan yang sama.²³

Strategic Partnership biasanya diikuti dengan *Plan of Action* jangka panjang yang mencakup semua tujuan dalam dokumen yang ditandatangani, seperti tujuan politik, diplomasi, ekonomi, IPTEK, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, secara substansi masing-masing kemitraan biasanya membuat perjanjian di banyak sektor, mempunyai sistem *review* untuk masing-masing sektor yang dibahas melalui mekanisme pertemuan *joint commission* yang dilaksanakan secara berkala.²⁴

1.6 Argumen Pokok

Berangkat dari kerangka pemikiran ini, Penulis mengajukan sebuah argumen bahwa NAASP sebagai mekanisme multilateral belum berhasil mengakomodir negara-negara di Asia dan Afrika sebagai konsekuensi dari (1) **faktor eksternal**, yaitu tingginya aktifitas bilateralisme yang dilakukan oleh negara-negara anggota NAASP di luar mekanisme NAASP serta kontestasi bilateral *Strategic Partnership* negara-negara anggota NAASP yang terbukti jauh lebih efektif tinimbang NAASP itu sendiri yang bersifat multilateral; dan (2) **faktor internal**, yaitu dilema kepentingan di antara Indonesia dan Afrika Selatan selaku Keketuaan Bersama NAASP.

Sejalan dengan argumen itu, dalam penelitian ini Penulis pula mengajukan sebuah debat berdasarkan paradoks Reflektifisme dan Rasionalisme. Debat ini menjadi pendekatan untuk mengkaji NAASP lebih jauh. Reflektifisme memiliki

²³ *Isu Global dalam Kemitraan Strategis Indonesia: Peningkatan Kerjasama pada Penanganan Isu Global untuk Mendukung Pelaksanaan Politik Luar Negeri*. BPPK Kemlu RI: Jakarta (Desember 2013). Hal. 12.

²⁴ *Ibid.* Hal. 14.

proposisi bahwa *Common Interest* adalah faktor yang mendukung terciptanya peluang kerjasama yang saling menguntungkan dalam hubungan antar negara-negara. Di sisi lain, Rasionalisme justru malah sebaliknya berlawanan. Menurut Rasionalisme, *Common Interest* saja tidak cukup untuk menjadi faktor yang mendukung terciptanya peluang kerjasama yang saling menguntungkan dalam hubungan negara-negara tanpa didukung dengan sebuah bentuk kerjasama yang konkrit.

Berangkat dari debat itu, NAASP dapat dijelaskan sebagai realita baru yang lahir dari dialektika dua sintesis, yakni (1) realita proposisi Reflektifisme, dan (2) realita proposisi Rasionalisme. Jadi, NAASP merupakan bentuk kerjasama yang konkrit antar negara-negara Asia dan Afrika berdasarkan pada *Common Interest* negara-negara Asia dan Afrika yang terikat identitas *shared value* dan *historical ties* KAA 1955. Namun demikian, dalam kasus NAASP baik proposisi Reflektifisme maupun proposisi Rasionalisme itu sama-sama memerlukan pendalaman lebih jauh lagi untuk menjawab fenomena belum berfungsinya NAASP sebagaimana diharapkan.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada perdebatan besar kedua dalam Hubungan Internasional antara paradigma Tradisionalis dan Behavioralis.²⁵ Perdebatan ini fokus pada perdebatan yang

²⁵ Hedley Bull. *International Theory: The Case for a Classical Approach*. World Politics: Vol. 18, No.3 (Maryland: The Johns Hopkins University Press, April 1966). Hal. 361-377.

bersifat metodologi. Perdebatan terpusat pada usaha dari kedua paradigma ini dalam menjawab pertanyaan, “*Apakah Hubungan Internasional itu sebuah ilmu? Jika ilmu, perangkat teoritik-metodologi apa yang digunakan untuk memahami fenomena Hubungan Internasional?*”

Guna menjawabnya, para pendukung Tradisionalis dan Behavioralis berbeda pendapat. Dalam pandangan para ilmuwan Tradisionalis, disiplin ilmu Hubungan Internasional adalah rumpun Ilmu Sosial. Maka itu, cara mendekati ilmu Hubungan Internasional harus dengan menggunakan pranata dan metodologi ilmiah sebagaimana lazimnya Ilmu Sosial. Artinya, Ilmu Hubungan Internasional harus didekati, ditelaah, dan dianalisis dengan menggunakan perangkat teoritik dan metodologik yang biasa dipergunakan dalam Ilmu Sosial.

Penganut paradigma Tradisionalis menyatakan bahwa obyek studi ilmu Hubungan Internasional hakikatnya adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang sarat nilai (*value loaded*). Artinya, manusia punya kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ilmuwan Hubungan Internasional tidak terlepas dari nilai. Setiap ilmuwan Hubungan Internasional dalam melakukan riset, kajian, dan penelitian tentang fenomena Hubungan Internasional pasti akan bersifat subyektif, memihak, terpengaruh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan agama, dan lain-lain. Pendek kata, ilmuwan Hubungan Internasional tidak bisa membebaskan diri dari nilai yang ada atau melekat dalam dirinya (*value-loaded*). Paradigma Tradisionalis menekankan pada metodologi kualitatif dalam menganalisa gejala Hubungan Internasional. Teknik pengumpulan data lebih mengutamakan pada wawancara mendalam, kajian partisipatif, dan studi literatur. Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, data

huruf, data uraian kata-kata, dan bukan data angka. Paradigma Tradisionalis menekankan pada Ilmu Terapan. Artinya, ilmuwan Hubungan Internasional harus melakukan pemihakan terhadap suatu negara atau suatu pihak. Ilmuwan Hubungan Internasional harus membuat riset yang bersifat ‘pemecahan masalah’ sehingga hasil keilmuwanannya harus menyatakan baik dan buruk, benar dan salah terhadap suatu aktor Hubungan Internasional. Ilmuwan Hubungan Internasional harus membela aktor Hubungan Internasional yang benar dan mengutuk aktor Hubungan Internasional yang salah dalam hubungan antar negara.

Paradigma Tradisionalis menekankan pada aspek historis. Artinya, setiap ilmuwan Hubungan Internasional harus menggunakan analisis sejarah dalam menganalisis gejala Hubungan Internasional. Pola-pola perulangan sejarah atau adagium ‘sejarah pasti berulang’ diyakini oleh penganut paradigma Tradisionalis. Logika yang ingin dibangun dalam adagium itu adalah bahwa ‘kejadian hari ini terkait dengan kejadian masa lalu’ dan ‘kejadian masa depan pasti berasal atau ada hubungannya dengan kejadian saat ini’.

Berbeda dengan paradigma Tradisionalis, paradigma Behavioralis menyatakan bahwa disiplin ilmu Hubungan Internasional memang merupakan bagian dari rumpun Ilmu Sosial. Namun demikian, agar ilmu Hubungan Internasional menjadi ilmiah atau saintifik, maka ilmu Hubungan Internasional harus membuka diri dan mengembangkan metodologi ilmiah yang terdapat dalam ilmu alam. Agar ilmu Hubungan Internasional memiliki bobot ilmiah yang kuat, maka disarankan ilmu Hubungan Internasional meminjam atau menggunakan perangkat teoritik dari ilmu-ilmu alam. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat banyak disiplin ilmu yang masuk kategori rumpun ilmu sosial menggunakan

metode dari ilmu alam, seperti ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan lain-lain. Paradigma Behavioralis menyatakan bahwa ilmuwan Hubungan Internasional harus bebas nilai (*value free*) dalam menganalisis gejala Hubungan Internasional. Paradigma Behavioralis menyarankan adanya penggunaan metode kuantitatif sebagaimana yang lazim dalam ilmu alam. Dalam melakukan penelitian Hubungan Internasional, ilmuwan Hubungan Internasional harus menggunakan teknik statistik, logika kalkulatif, analisis matematik, dan teknik kuantifikasi sehingga data yang diperoleh dapat dihitung dan dapat diukur untuk menghasilkan validitas dan reliabilitas tinggi. Bahkan, jika dianggap perlu dan memungkinkan, diadakan uji eksperimentasi dalam setiap penelitian Hubungan Internasional sehingga akan kuat bobot ilmiah atau saintifiknya.²⁶

Paradigma Behavioralis menegaskan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu murni. Artinya, ilmuwan Hubungan Internasional harus obyektif, netral, dan independen dalam meneliti gejala Hubungan Internasional. Hasil penelitian tidak boleh direayasa, dimanipulasi, dan dibuat untuk kepentingan negara tertentu. Paradigma Behavioralis menekankan aspek sosiologis, psikologis, dan empiris dalam menganalisis gejala Hubungan Internasional. Berikut ini adalah tabel perdebatan antara paradigma Tradisionalis dan Behavioralis.

Tabel Perdebatan Tradisionalis versus Behavioralis

	TRADISIONALIS	BEHAVIORALIS
Tahun Kemunculan	Sebelum Perang Dunia II	Setelah Perang Dunia II
Nilai	<i>Value Loaded</i>	<i>Value Free</i>
Parameter	Kualitatif	Kuantitatif
Mazhab	Post-Positivisme	Positivisme

²⁶ Morton A. Kaplan. *The New Great Debate: Traditionalism vs Science in International Relations*. World Politics, Vol. 19, No.1 (Maryland: The Johns Hopkins University Press, Oktober 1966). Hal. 1-20.

	TRADISIONALIS	BEHAVIORALIS
Metode	Metode Historis	Metode Sainifik
Kerangka Analisis	<i>Understanding</i>	<i>Explanations</i>
Jenis Keilmuan	Ilmu Terapan	Ilmu Murni
Orientasi	Nilai	Fakta
Paradigma	Historis Yuridis	Sosiologis Psikologis
Sifat	Normatif	Empiris
Logika Berpikir	Deduksi	Induktif
Kritik	Terlalu menekankan pada aspek hasil/tujuan sehingga mengabaikan aspek cara/proses	Terlalu menekankan pada aspek proses / cara sehingga mengabaikan aspek hasil/tujuan

Sumber: Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisionalis dan Sainifik²⁷

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui data-data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Perpustakaan Ali Atlas Kemenlu RI di Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Museum Konperensi Asia Afrika. Selain itu, data diperoleh melalui studi literatur, jurnal, dan informasi yang diperoleh dari situs-situs resmi di internet.

Dokumen terkait NAASP yang dibutuhkan adalah Deklarasi NAASP pada KTT Asia Afrika 2005, Deklarasi Revitalisasi NAASP pada KTT Asia Afrika 2015, pidato Presiden Afrika Selatan dan pidato Presiden Indonesia pada KTT Asean 2002 di Kamboja, pidato Presiden Afrika Selatan dan pidato Presiden Indonesia pada KTT Asia Afrika 2005, dan Pidato Presiden Indonesia pada KTT Asia Afrika 2015.

²⁷ *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang: Intrans Publishing (2014). Hal: 15.

Selain itu, data program NAASP yang telah digulirkan antara tahun 2005 dan 2015 turut pula dianalisa. Sementara itu, data primer diperoleh dari Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik, BPPK Kementerian Luar Negeri, dan Direktur Global Future Institute.

Akan halnya implementasi *Strategic Partnership* di negara-negara di kawasan Asia dan kawasan Afrika, Penulis merujuk pada buku (1) *ASEAN-EU: Strategic Partnership in the Making*, (2) *African Union and EU Strategic Partnership*, (3) *Strategic Partnership in India: Balancing without Alliances*, dan (4) *China - Russo Strategic Partnership*.

Akan halnya wawancara, Penulis melakukan wawancara kepada staf bidang perencanaan kebijakan Afrika (BPPK Kemlu RI), dan mantan Duta Besar RI di Ethiopia. Selain itu, Penulis juga mewawancarai mantan pejabat BPKRT Kedutaan Besar RI di Nairobi Kenya, dan Direktur Global Future Institute Jakarta.

1.8 Sistematika Pembahasan

Secara umum tujuan Penulis dalam penelitian tesis ini adalah ingin memberikan gambaran tentang kerangka kerja sama hubungan negara-negara Asia dan Afrika pasca KAA 1955 yang diwujudkan dalam bentuk NAASP pada KTT Asia Afrika 2005 di Bandung. NAASP sebagaimana dinyatakan pada dokumen pendiriannya diharapkan dapat menjadi forum kerjasama yang kongkrit dan akomodatif terhadap kepentingan bersama negara Asia dan Afrika. Sekaitan itu, tesis ini menjelaskan upaya yang ditempuh Indonesia dalam NAASP dibagi dalam lima bab yang berkelindan satu sama lain.

Penulis terlebih dahulu menyajikan bagian pendahuluan penelitian tesis pada **Bab I**. Guna memberikan panduan dalam penelitian, Penulis awalnya membahas latar belakang masalah NAASP. Ada kesenjangan antara citra NAASP yang diperlihatkan di permukaan dan NAASP pada tataran pragmatis. Berangkat dari persoalan itu, Penulis menyusun langkah-langkah prosedural penelitian, seperti identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, argumen pokok, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, pada **Bab II** Penulis membahas genealogi politik luar negeri Indonesia sejak era Orde Lama hingga Orde Baru. Ini bermanfaat untuk memetakan orientasi politik luar negeri dan geopolitik Indonesia terutama terhadap Afrika. Sekaitan itu, Penulis menjudulkannya sebagai *Dinamika Politik Internasional Indonesia – Afrika*. Pada bab ini Penulis membahas tiga hal utama yang menandai transformasi politik luar negeri Indonesia, yakni (1) Irian Barat dan Politik Luar Negeri Indonesia di Afrika, (2) Desukarnoisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia di Afrika, dan (3) Politik Luar Negeri Indonesia di Afrika Pasca Desukarnoisasi. Pada poin ke-1 dan poin ke-2, Indonesia memanfaatkan aliansi ke negara-negara Asia dan Afrika sebagai mitra aliansi bagi pemenuhan kepentingan Indonesia dalam persoalan Irian Barat. Namun pada poin ke-3, Penulis berupaya menyajikan situasi paradoks dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang kemudian hari berdampak pada upaya Indonesia dalam membangkitkan solidaritas Asia dan Afrika melalui NAASP.

Pada **Bab III** Penulis menyajikan profil NAASP. Bab ini Penulis judul *NAASP sebagai Forum Kerjasama Multilateral Asia Afrika*. Penulis memulai

pembahasan dengan posisi NAASP sebagai forum kerja sama. Lalu, secara berurutan Penulis menjelaskan proses kemunculan NAASP hingga implementasinya dalam lima fase, yakni: (1) Fase Pembukaan NAASP, (2) Fase Perumusan NAASP, (3) Fase Pengesahan NAASP, (4) Fase Implementasi NAASP, dan (5) Fase Revitalisasi NAASP. Terakhir, Penulis menyajikan analisa capaian NAASP sejak digulirkan pada tahun 2005 hingga tahun 2014 sebelum disetujui untuk diperkuat kembali melalui dokumen revitalisasi NAASP pada tahun 2015.

Puncaknya, Penulis mengkaji NAASP lebih dalam pada **Bab IV**. Pada bab ini Penulis melakukan dua langkah kajian, yaitu melalui kajian terhadap Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor-faktor internal dilatari hal-hal yang terkait pada kepentingan para pengagas sekaligus ketua bersama NAASP, yakni Indonesia dan Afrika Selatan. Sekaitan itu, faktor internal Penulis juduli NAASP: Proliferasi Kepentingan. Pada sisi Indonesia, Penulis membahas empat hal, yakni 1) Kemitraan Strategis Indonesia: *Missing Link* Indonesia-Afrika, 2) Kepentingan Regim Indonesia, 3) Volume Perdagangan Indonesia-Afrika, 3) Geopolitik Politik Luar Negeri Indonesia. Sementara itu, di sisi Afrika ada dua hal utama, yakni 1) Afrika Bangkit, dan 2) NEPAD: Mekanisme Kemitraan Strategis Afrika).

Kemudian, untuk faktor eksternal ada dua hal utama dalam analisa Penulis yang telah berkontribusi terhadap keberlangsungan NAASP, yaitu 1) Aliansi Asimetri (Kemitraan Strategis di Afrika), dan 2) NAASP: Bilateralisme versus Multilateralisme. Dalam hal Aliansi Asimetri, Penulis bermaksud mengilustrasikan ketatnya kontestasi antar kemitraan strategis yang hadir di Afrika asal berbagai negara kunci di luar Afrika. Adapun aktifitas bilateral dari

berbagai negara kunci di Asia yang menggunakan mekanisme sejenis dijelaskan oleh Penulis dalam Bilateralisme versus Multilateralisme. Ujungnya Penulis menganalisa NAASP menggunakan pendekatan multilateralisme dalam Analisa Faktor Internal dan Faktor Eksternal dengan proposisi, yakni 1) Institusionalisasi Rezim, 2) Modalitas Multilateralisme, dan 3) Bilayer Rezim Internasional.

Terakhir pada **Bab V** yang merupakan penutup dari kajian, Penulis menyajikan temuan dan kesimpulan. Temuan dan kesimpulan Penulis sampaikan dalam silogisme proposisi hipotesis kondisional. Untuk menarik kesimpulan hasil penelitian tentang NAASP sebagai *Upaya Indonesia untuk Membangkitkan Solidaritas Asia Afrika melalui NAASP*, Penulis menggunakan tiga pendekatan eksplanasi, yakni 1) eksplanasi pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika, 2) eksplanasi kesenjangan antara kepentingan Indonesia dan Afrika, dan 3) eksplanasi aktifitas bilateralisme antara Afrika dan negara-negara kunci di Asia. Ketiga eksplanasi itu adalah proposisi hipotesis kondisional. Sebab, antara eksplanasi yang satu dengan yang lainnya terdapat pola saling saling mempengaruhi. Kondisi pada eksplanasi pertama memiliki hubungan ketergantungan secara substansi atas terwujudnya eksplanasi kedua dan ketiga. Dengan lain kata, eksplanasi pertama adalah anteseden atas eksplanasi kedua dan ketiga sebagai konsekuensinya. Artinya, pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika telah mempengaruhi skala prioritas kepentingan Indonesia terhadap Afrika dan akhirnya berpengaruh terhadap munculnya kesenjangan kepentingan antara Indonesia dan Afrika dalam NAASP serta ketidaksesuaian hasil implementasi NAASP seperti yang diharapkan Afrika